

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baik negara berkembang maupun negara maju sedang berjuang dengan masalah demografis seperti pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi yang cepat dan distribusi populasi yang tidak merata. Indonesia juga sedang berjuang dengan krisis populasi. Tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian dan pengelolaan yang cermat dari seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan pemerintah. Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, India dan Cina. Menurut Wordometer memperkirakan jumlah penduduk di dalam negeri sebanyak 285,72 juta orang hingga 25 November 2025. Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang yang tidak luput dari masalah kependudukan. Secara garis besar, masalah pokok di bidang kependudukan yang dihadapi Indonesia yaitu jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.

Maka dari itu pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Untuk mengendalikan pertumbuhan, perkembangan dan membentuk keluarga bahagia. Dalam undang-undang inilah diatur, hal-hal yang bersifat umum dan khusus tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga termasuk kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan termasuk pelayanan

KB yang berkualitas, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya termasuk layanan keluarga berencana.

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1957 pada masa itu disebut dengan Program Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), pada tahun 1968 diubah menjadi Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Kemudian pada masa itu Pemerintahan Orde Baru, Program KB semakin diperkuat dan dijadikan program nasional. Sehingga pada tahun 1970 di ubah lagi menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dengan mengurangi angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk tidak melebihi kapasitas produksi.

Program Keluarga Berencana adalah suatu gerakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi angka lahir, program ini diancang dalam rangka usaha pemerintah untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas. Pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk membuat perubahan dari suatu kondisi tertentu ke keadaan lain yang lebih bernilai. Program ini sendiri berada di bawah pengawasan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini memiliki wujud untuk menggunakan alat kontrasepsi agar mampu untuk meredakan maupun mencegah adanya kehamilan pada ibu. Alat kontrasepsi ini sendiri berupa pil KB, suntik, *intra uterine device* (IUD), vasektomi maupun tubektomi, dan juga KB implan. Pelaksanaan program KB ini sendiri nantinya diharapkan bisa membantu menekan angka kelahiran secara

keseluruhan yang ada pada wanita Indonesia bersamaan dengan peningkatan penggunaan alat kontrasepsi itu sendiri. Maka dari itu partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB bisa dipastikan sebagai salah satu faktor keberhasilan program pemerintah dalam mengontrol laju pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Kecamatan Kelua merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Tabalong yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 264.694 jiwa, dengan Pasangan Usia Subur (PUS) yang berjumlah 3.574 orang, namun dengan banyaknya jumlah PUS di kecamatan Kelua pengguna KB aktif hanya berjumlah 2.737 orang dan pengguna KB implant di kecamatan Kelua berjumlah 122 orang. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah pengguna KB implant aktif di Kecamatan Kelua Kabupaten
Tabalong Tahun 2026

No	Desa	KB Implant	PUS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pulau	7	275
2.	Ampukung	5	336
3.	Telaga Itar	13	179
4.	Sungai Buluh	13	237
5.	Binturu	4	305
6.	Pudak Stegal	9	331
7.	Pasar Panas	5	267
8.	Masintan	16	285
9.	Takulat	10	287
10.	Paliat	14	278
11.	Karangan Putih	19	479
12.	Bahungin	7	315
Jumlah		122	3.574

Sumber: Kantor Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kec. Kelua Tahun 2026

Berdasarkan observasi awal, penulis mendapati permasalahan yang terjadi pada program keluarga berencana (KB) implant pada kecamatan Kelua.

Ada beberapa fenomena masalah yang penulis dapati saat observasi awal antaranya:

1. Kurang meratanya pemberian informasi dan sosialisasi dari pihak balai penyuluh KB tentang KB implant sehingga masyarakat tidak paham atau bahkan tidak tertarik untuk menggunakan KB implant. *(Sumber: Pegawai Kantor Balai Penyuluh KB Kelua)*
2. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan KB implant di Kecamatan Kelua masih rendah dibandingkan dengan daftar pasangan usia subur (PUS) khususnyadi desa Binturu karena terpengaruh isu negatif, seperti risiko KB implant mengalami pergeseran di dalam tubuh, gangguan menstruasi yaitu haid tidak teratur dalam beberapa bulan, serta tidak adanya dukungan dari pihak suami untuk menggunakan KB implant. *(Sumber: Pegawai Kantor Balai Penyuluh KB Kelua)*
3. Belum ada kegiatan rutin berupa ruang diskusi dan penyuluhan yang melibatkan penyuluh KB, puskesmas, pemerintah desa, dan balai KB. Akibatnya, masyarakat yang berpendidikan rendah kesulitan untuk menyampaikan pendapat, bertanya, atau berbagi pengalaman dengan pihak yang lebih ahli di bidangnya. *(Sumber: Pegawai Kantor Balai Penyuluh KB Kelua)*

Berdasarkan fenomena masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) Implant di Desa Binturu Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) Implant di Desa Binturu Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”, menurut Menurut Slamet (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2019:91) ada tiga unsur pokok partisipasi masyarakat yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian:

1. Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) Implant di Desa Binturu Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) Implant di Desa Binturu Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) Implant di Desa Binturu Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) Implant di Desa Binturu Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dan memberikan informasi atau wawasan yang berarti bagi peneliti lainya terkait partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Keluarga Berencana (KB) implant di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

b. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Keluarga Berencana (KB) implant di Kecamatan Kelua, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya program Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga kecil, sehat, dan sejahtera dan sertamengajak ibu-ibu untuk berpartisipasi pada program keluarga berencana terutama KB implant khususnya di Desa Binturu Kecamatan Kelua.